

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Indonesia

*¹Eka Purnama

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: ekapurnama@iaingorontalo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Open Unemployment Rate (OUR), Human Development Index (HDI), and Labor Force Participation Rate (LFPR) on poverty in Indonesia. The study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis with cross-sectional data covering 38 provinces in Indonesia. Secondary data were obtained from the official publications of Statistics Indonesia (BPS). Poverty rate is used as the dependent variable, while OUR, HDI, and LFPR are employed as independent variables. The results show that the Open Unemployment Rate has a positive and significant effect on poverty, indicating that higher unemployment leads to an increase in the poverty rate. The Human Development Index has a negative and significant effect on poverty, suggesting that improvements in education, health, and living standards contribute to poverty reduction. Meanwhile, the Labor Force Participation Rate shows a positive and significant effect on poverty, indicating that increased labor force participation does not automatically reduce poverty when not accompanied by adequate employment opportunities and job quality. Simultaneously, OUR, HDI, and LFPR significantly affect poverty in Indonesia. These findings highlight the importance of strengthening job creation policies, improving the quality of human development, and enhancing labor market effectiveness as part of a comprehensive poverty alleviation strategy in Indonesia.

Keywords: Poverty, Open Unemployment Rate, Human Development Index, Labor Force Participation Rate, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan data cross section yang mencakup 38 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan TPT, IPM, dan TPAK sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas. Secara simultan, TPT, IPM, dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta penguatan efektivitas pasar tenaga kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indonesia

How to Cite: Purnama, E. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Indonesia. Journal Transformation of Mandalika, E-ISSN:2745-5882,P-ISSN:2962-2956
doi: <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.6004>.



<https://doi.org/10.36312/jtm.v4i8.6004>

Copyright©2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.

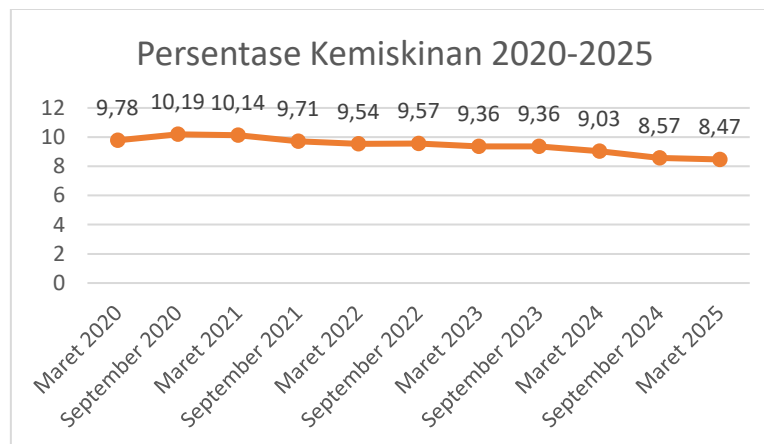


PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang paling persisten di Indonesia, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan manusia yang saling berkaitan. Meskipun

angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan dalam dua dekade terakhir, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2025 sebesar 8,47 % dari total penduduk (BPS, 2025). Sedangkan menurut Bank Dunia (World Bank) dalam *Macro Poverty Outlook*, lebih dari 68,3 % penduduk Indonesia pada tahun 2024 hidup di bawah garis kemiskinan internasional (upper middle income poverty line) (World Bank, 2025). Ini setara lebih dari 171,8 juta orang.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang memiliki standar hidup yang jauh di bawah rata-rata standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat (Fitria & Novita, 2024). Kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok masyarakat kekurangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta pelayanan kesehatan (Handani & Suharianto, 2025). Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan (Handayani, 2022). Kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan, melainkan kondisi multidimensional yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.



Gambar 1. Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2020-2025

Gambar 1 menunjukkan tren kemiskinan yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji secara mendalam. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan akibat masih adanya kesenjangan antarwilayah dan kerentanan kelompok masyarakat tertentu terhadap guncangan ekonomi. Sejumlah penelitian masih mengkaji kemiskinan secara agregat, sementara keterkaitan dinamika pasar tenaga kerja, meliputi tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia, belum dianalisis secara komprehensif. Padahal, ketiga faktor tersebut tidak hanya berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga merupakan aspek strategis yang sangat membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji determinan kemiskinan secara terintegrasi guna mendukung perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia,

dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Kemiskinan	TPT	IPM	TPAK
1	Aceh	12.33	5.5	76.23	65.63

2	Sumatera Utara	7.36	5.05	76.47	70.13
3	Sumatera Barat	5.35	5.69	77.27	70.95
4	Riau	6.16	4.12	76.31	64.68
5	Jambi	7.19	4.48	75.13	67.11
6	Sumatera Selatan	10.15	3.89	74.76	70.56
7	Bengkulu	12.08	3.24	75.68	71.5
8	Lampung	10	4.07	73.98	71.16
9	Kep. Bangka	5	4.17	75.26	67.67
10	Belitung	4.44	6.89	80.53	66.84
11	Kep. Riau	4.28	6.18	85.05	65.4
12	Dki Jakarta	7.02	6.74	75.9	68.91
13	Jawa Barat	9.48	4.33	74.77	73.17
14	Jawa Tengah	10.23	3.18	82.48	73.73
15	Di Yogyakarta	9.5	3.61	76.13	74.25
16	Jawa Timur	5.63	6.64	77.25	65.82
17	Banten	3.72	1.58	79.37	77.4
18	Bali	11.78	3.22	73.97	76.5
19	Nusa Tenggara	18.6	3.23	69.89	75.81
20	Barat	6.16	4.23	72.09	67.64
21	Nusa Tenggara	5.19	3.47	74.86	69.9
22	Timur	3.84	3.94	76.1	70.41
23	Kalimantan Barat	5.17	5.33	79.39	66.4
24	Kalimantan	5.54	3.9	74.04	69.19
25	Tengah	6.71	6.03	76.32	65.3
26	Kalimantan	10.92	3.02	72.82	70.51
27	Selatan	7.6	4.96	75.92	65.99
28	Kalimantan Timur	10.54	3.27	74.25	69.77
29	Kalimantan Utara	13.24	3.12	72.62	67.52
30	Sulawesi Utara	10.41	3.17	71.16	71.81
31	Sulawesi Tengah	15.38	5.95	74.09	67.56
32	Sulawesi Selatan	5.81	4.26	72.52	68.99
33	Sulawesi Tenggara	20.66	4.21	68.48	71.45
34	Gorontalo	17.95	6.61	70.55	68.14
35	Sulawesi Barat	19.16	6.92	74.69	70.38
36	Maluku	19.71	4.9	69.54	68.15
37	Maluku Utara	28.9	3.55	60.64	78.97
38	Papua Barat	30.03	1.68	54.91	88.27
	Papua Barat Daya				
	Papua				
	Papua Selatan				
	Papua Tengah				
	Papua				
	Pegunungan				

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) bps.go.id)

Tabel 1. menggambarkan kondisi persentase kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari seluruh provinsi di Indonesia yang berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah, terutama wilayah barat dan timur Indonesia, terlihat bahwa di wilayah timur memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan variasi antarwilayah dan belum mengalami penurunan yang stabil. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di beberapa daerah menunjukkan masih terbatasnya kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja secara optimal, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dalam aspek pendidikan atau kesehatan dapat menghambat kemampuan penduduk memperoleh pekerjaan yang layak, memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga. Index Pembangunan Manusia (IPM) dijadikan sebagai standar dasar model pembangunan suatu negara atau daerah dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (Rusdi, 2023). Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM yang tercermin oleh rendahnya IPM menyebabkan rendahnya produktifitas (Sagala dkk, 2024). Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang berfluktuasi menggambarkan ketidakstabilan dalam keterlibatan penduduk usia produktif di sektor ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi biasanya berkorelasi dengan rendahnya tingkat kemiskinan, karena lebih banyak penduduk yang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan (Sianturi dkk, 2024).

Penelitian empiris dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan bersifat tidak konsisten. Beberapa studi menemukan pengaruh signifikan, sementara studi lain menyatakan sebaliknya. Lidya dkk (2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Lhoksumawe. Sedangkan, Rivana dan Gani (2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. Handani dan Suharianto (2025) juga menemukan bahwa TPAK berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, akan tetapi TPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Sedangkan, Nurhailia dan Anwar (2024) menyatakan sebaliknya bahwa TPAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Sejumlah penelitian juga telah mengeksplorasi hubungan antara kemiskinan dan faktor-faktor ekonomi seperti pengangguran dan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, terdapat beberapa kesenjangan penting yang menunjukkan kebaruan penelitian ini. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur (Febrianti & Utami, 2025) menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meskipun dikaji bersama dalam satu model, akan tetapi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada periode tertentu, sehingga peran kedua variabel tersebut masih diperdebatkan dalam konteks regional tertentu. Di sisi lain, studi di Provinsi Kalimantan Timur (Rivana & Gani, 2024) yang meneliti pengaruh TPT dan IPM terhadap kemiskinan menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun tidak menilai peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan. Sementara itu, penelitian di Aceh (Nurhailia & Anwar, 2024) menunjukkan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan IPM juga berpengaruh signifikan, namun fokus kajiannya terbatas pada 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi tanpa memasukkan TPT secara bersamaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan temuan empiris yang perlu diinvestigasi lebih lanjut pada skala nasional, mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya masih terfragmentasi berdasarkan wilayah atau menganalisis variabel secara terpisah. Belum adanya kajian komprehensif yang menguji Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara

simultan terhadap kemiskinan menjadi celah penelitian yang penting, karena masing-masing variabel memiliki mekanisme berbeda dalam memengaruhi kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai determinan kemiskinan di Indonesia serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan kontekstual.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Indonesia secara simultan maupun parsial dalam periode penelitian yang ditetapkan. Berdasarkan konsep yang digunakan oleh BPS, TPT mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan meskipun aktif mencari kerja; variabel ini dianalisis untuk melihat sejauh mana ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja berdampak pada peningkatan kemiskinan. Selanjutnya, IPM diukur melalui tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan/umur harapan hidup, dan standar hidup layak, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Sementara itu, TPAK menggambarkan persentase penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk memahami dinamika kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan nasional berdasarkan indikator resmi BPS. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi instansi nasional seperti BPS dan Kementerian/Lembaga terkait, dengan fokus analisis pada tingkat provinsi atau nasional, sesuai tujuan untuk memperoleh gambaran makro mengenai determinan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini tidak mengkaji faktor-faktor lain seperti inflasi, distribusi pendapatan, atau investasi daerah, sehingga hasil analisis difokuskan pada pengaruh tiga variabel utama yang telah dirumuskan. Dengan merangkum hasil tinjauan literatur dan kesenjangan penelitian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan dugaan bahwa TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan IPM dan TPAK berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Uraian ini sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian yang akan diuji pada bagian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena seluruh variabel penelitian merupakan data numerik yang bersifat *cross section* yang melibatkan 38 provinsi di seluruh Indonesia. Penggunaan data lintas provinsi memungkinkan penelitian ini untuk menangkap perbedaan karakteristik sosial ekonomi antar daerah, termasuk disparitas pembangunan manusia, kondisi pasar tenaga kerja, dan tingkat partisipasi penduduk usia kerja. Model regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen, serta untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh yang ditimbulkan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintah Badan Pusat Statistik melalui website resmi www.bps.go.id. Sumber data meliputi:

1. Variabel Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen, diperoleh dari Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), Semester 1 Tahun 2025
2. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel independen diperoleh dari Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), Bulan Februari 2025

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independent diperoleh dari [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)
4. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel independen diperoleh dari Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) menurut Provinsi (Persen), Bulan Februari 2025

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tingkat kesalahan *error* sebesar $\alpha = 0,05$. Pengolahan data dilakukan dengan software SPSS versi 25. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual regresi berdistribusi normal. Untuk mengujinya menggunakan P-Plot dan uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* (uji K-S) pada program SPSS. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika signifikansi $> 0,05$ maka dinyatakan data berdistribusi normal
 - 2) Jika signifikansi $< 0,05$ maka dinyatakan data tidak berdistribusi normal
 - b. Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui korelasi antar variabel independent. Pengujian dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) pada program SPSS. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika Tolerance $> 0,05$ atau $VIF < 10$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas
 - 2) Jika Tolerance $< 0,05$ atau $VIF > 10$, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas
 - c. Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi memiliki variansi residual yang tidak sama untuk pengamatan lainnya. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan metode Glejser dengan pada program SPSS dengan kriteria pengujian sebagai berikut:
 - 1) Jika signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas
 - 2) Jika signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas
2. Analisis Regresi Linear Berganda
 - a. Model regresi yang digunakan adalah:

$$KM = \alpha + \beta_1 TPT + \beta_2 IPM + \beta_3 TPAK + \varepsilon$$
 dimana

KM : Tingkat Kemiskinan
 TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 α : konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi
 ε : *error term*
 - b. Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu:

H_0 : tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
 H_1 : terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

 Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak
 - 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

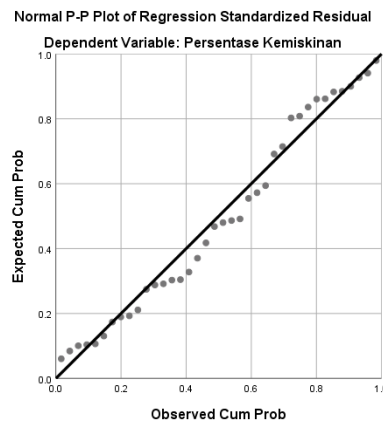
- c. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu:
 H_0 : tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen
 H_1 : terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen
 Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:
 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak
 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- d. Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk menghitung besarnya variabel independent terhadap variabel dependen. Besaran koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$, semakin mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh perubahan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas dengan P-Plot

Tabel 2. Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	3.4100195
	Deviation	4
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.100
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Penelitian (data diolah SPSS 25, 2025)

Hasil uji normalitas residual regresi dengan P-P Plot pada Gambar 2, menunjukkan residual berada di sekitar garis linear, secara visual dapat diasumsikan bahwa residual regresi berdistribusi normal. Demikian pula dengan hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 2, menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0.200 > 0.05$. Kesimpulannya bahwa residual regresi berdistribusi normal. Artinya model regresi yang terbentuk memenuhi layak untuk pengujian statistik karena berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	.578	1.730
	Indeks Pembangunan Manusia	.613	1.632
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	.415	2.411

a. Dependent Variable: Persentase Kemiskinan

Hasil Penelitian (data diolah SPSS 25, 2025)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* dari tiap variabel lebih besar dari $\alpha = 0.05$ dan nilai $VIF < 10$. Sehingga asumsi tidak terdapat multikolinearitas terpenuhi. Artinya, tidak terjadi korelasi kuat antar variabel yang diteliti. Karena model regresi yang baik tidak mengandung multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.247	11.999		.104	.918
	Tingkat Pengangguran Terbuka	.404	.292	.297	1.384	.175
	Indeks Pembangunan Manusia	-.037	.077	-.101	-.476	.637
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	.036	.104	.088	.346	.731

a. Dependent Variable: Abs_Res

Hasil Penelitian (data diolah SPSS 25, 2025)

Tabel 4. Menunjukkan uji heterokedastisitas dengan metode Glejser diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Artinya varians residual konstan atau homokedastisitas dan memenuhi asumsi klasik.

Analisis Regresi Berganda

1. Uji t (Parsial)

Tabel 5. Tabel Model Regresi dan Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	40.006	22.637		1.767	.086
Tingkat Pengangguran Terbuka	1.359	.554	.288	2.455	.019
Indeks Pembangunan Manusia	-.916	.144	-.727	-6.371	.000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	.463	.198	.325	2.345	.025

a. Dependent Variable: Persentase Kemiskinan
 Hasil Penelitian (data diolah SPSS 25, 2025)

Berdasarkan Tabel 5, dapat disusun model regresi sebagai berikut:

$$KM = 40,006 + 1,359 TPT - 0,916 IPM + 0.463 TPAK$$

dimana

KM : Tingkat Kemiskinan

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari Tabel 5, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 40,006 menunjukkan bahwa variabel TPT, IPM dan TPAK konstan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 40,006
- Variabel TPT memiliki koefisien positif sebesar 1,359. Nilai $t_{hitung} = 2,455 > t_{tabel} = 2,03011$ dan $sig. 0,019 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Artinya, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika TPT meningkat 1%, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 1,359%.
- Variabel IPM memiliki koefisien negatif yaitu -0,916. Nilai $t_{hitung} = 6,371 > t_{tabel} = 2,03011$ dan $sig. 0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Artinya, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika IPM meningkat 1%, maka kemiskinan menurun sebesar 0,916%
- Variabel TPAK memiliki koefisien positif sebesar 0,463. Nilai $t_{hitung} = 2,345 > t_{tabel} = 2,03011$ dan $sig. 0,025 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Artinya, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika TPAK meningkat 1%, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.463%.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 6. Uji F (Simultan)**ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1157.703	3	385.901	30.496	.000 ^b
Residual	430.245	34	12.654		
Total	1587.947	37			

- a. Dependent Variable: Persentase Kemiskinan
- b. Predictors: (Constant), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil Penelitian (data diolah SPSS 25, 2025)

Tabel 6. Menunjukkan hasil uji F atau uji simultan dimana diperoleh nilai $F_{hitung} = 30,496 > F_{tabel} = 3,27$ dan *Sig.* sebesar $0.000 < 0.05$. Artinya, ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, secara bersama-sama (simultan) ketiga variabel yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari kondisi pasar tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi. Tingginya TPT mencerminkan keterbatasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan pendapatan masyarakat, sementara IPM menggambarkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, TPAK menunjukkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang turut menentukan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan terpadu yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perluasan partisipasi angkatan kerja.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Mo del	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.729	.705	3.55728

a. Predictors: (Constant), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka

b. Dependent Variable: Persentase Kemiskinan

Hasil Penelitian (data diolah SPSS 25, 2025)

Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,729. Nilai ini mengindikasikan bahwa variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,9%. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat, karena sebagian besar perubahan tingkat kemiskinan dapat diterangkan oleh ketiga variabel tersebut.

Sementara itu, sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain dapat berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, ketimpangan pendapatan, struktur ekonomi daerah, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial dan demografis lainnya yang juga berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, meskipun TPT, IPM, dan TPAK memiliki peranan yang besar dalam menjelaskan kemiskinan, penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel lain agar

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nilai konstanta sebesar 40,006 mengindikasikan bahwa apabila variabel TPT, IPM, dan TPAK dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat kemiskinan berada pada angka 40,006 persen. Nilai konstanta ini mencerminkan adanya faktor-faktor lain di luar model yang juga turut memengaruhi kemiskinan, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, dan kebijakan fiskal daerah.

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien positif sebesar 1,359 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% (sig. 0,019 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan TPT sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 1,359 persen. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi tenaga kerja yang menyatakan bahwa pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Mariolah dkk (2025) yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan salah satu determinan utama kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja secara optimal masih menjadi persoalan struktural dalam perekonomian nasional.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,916 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa peningkatan IPM sebesar 1 persen dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,916 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Lidya dkk (2024) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia meningkatkan produktivitas dan peluang kerja.

3. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki koefisien positif sebesar 0,463 dan signifikan pada $\alpha = 5$ persen (sig. 0,025 < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK justru diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meningkatnya partisipasi angkatan kerja tidak selalu diiringi dengan tersedianya lapangan kerja yang produktif dan berupah layak. Kondisi ini dapat terjadi ketika peningkatan TPAK didominasi oleh sektor informal dengan tingkat upah rendah. Artinya, TPAK dapat berpengaruh positif terhadap kemiskinan apabila kualitas pekerjaan rendah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk menjadi pertimbangan arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, khususnya melalui pengembangan sektor industri padat karya dan UMKM berbasis daerah. Kedua, peningkatan kualitas pembangunan manusia harus terus menjadi prioritas melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial, mengingat IPM terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Ketiga, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

harus diimbangi dengan kebijakan peningkatan kualitas pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan upah minimum agar partisipasi kerja tidak mendorong perluasan kemiskinan, khususnya di sektor informal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data lintas provinsi. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan kondisi kemiskinan antardaerah.

Secara parsial, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pengangguran secara langsung meningkatkan risiko penduduk jatuh ke dalam kondisi miskin akibat ketiadaan sumber pendapatan yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang produktif dan berupah layak. Dengan demikian, meskipun tren kemiskinan nasional menunjukkan penurunan, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih bersifat struktural dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan kebijakan pengentasan kemiskinan pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan hanya pada peningkatan partisipasi angkatan kerja. Upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka perlu dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor padat karya, serta penguatan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan yang layak. Pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat miskin memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan keterampilan kewirausahaan perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi kelompok usia produktif dan rumah tangga miskin. Pemerintah dapat mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan, pendampingan usaha, serta penyediaan akses permodalan yang mudah dan terjangkau.

Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya dirancang secara terpadu, tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta penguatan dukungan modal dan pelatihan yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan dampak jangka panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan memasukkan faktor lain seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, dan belanja sosial

pemerintah, serta menggunakan pendekatan data panel atau metode ekonometrika lanjutan agar mampu menangkap dinamika kemiskinan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. (2025) Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. Siaran Pers BPS. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
2. Febrianti, E., & Utami, H., W. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Penduduk Miskin di Jawa Timur Periode Tahun 2020-2024. *Jurnal Edueco*. 8(2). 551-560. <https://doi.org/10.36277/edueco.v8i2.366>
3. Fitria, D., & Novita, D. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Journal Transformasi of Mandalika*, 5(12), 433-439. <https://doi.org/10.36312/jtm.v5i12.3970>
4. Handani, T., & Suharianto, J. (2025). Pengaruh TPT, PDRB dan TPAK terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2023. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(2). 22-39. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i2.1284>
5. Handayani, N. (2022). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Diponegoro Journal of Economic. 11(1). 26-36. <https://doi.org/10.14710/djoe.32658>
6. Lidya, F., Rahayu, Asnidar, Hanum, M., Andiny, P., & Safuridar. (2024). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terdidik terhadap Kemiskinan di Kota Lhokmumawe. 5(12). 425-432. <https://doi.org/10.36312/jtm.v5i12.3972>
7. Mariolah, M. S., Handayani, W., Haryanto, A. E. P., & Fauzi, I. N. (2025). Pengaruh TPT dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. *Innovative: Journal of Social Science*. 5(1). 195-204. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17247>
8. Nurhailia, & Anwar, K. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan (Studi Kasus di 10 Kabupaten/Kota di Aceh dengan Kemiskinan Tertinggi Tahun 2020). *Jurnal Ekonomi Regional Uminal*. 6(3). 38-Tertinggi Tahun 2020). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*. 7(2). 38-48. <https://doi.org/10.29103/jeru.v7i2.20879>
9. Rivana, M., & Gani, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*. 20(1). 51-60. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1688>
10. Rusdi, M. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economic and Digital Business Review*. 4(1). 971-981. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.471>
11. Sagala, I., F. Romadhoni, A.F., Mardiana, A., Widyasari, A., Simamora, D. R., Nurfadiah, D., Sembiring, E. A. B., Harahap, I. A., Siregar, M. E. E., Alif, M. F., Adella, N., Agustian, R., & Sihotang, R. F. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*. 2(2). 309-342. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i2.3524>
12. Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M.D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*. 1(2). 3032-3495. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2606>

13. World Bank. (2025). The World Bank's Updated Global Poverty Lines: Indonesia. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>
14. Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
15. Badan Pusat Statistik. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: BPS.
16. Hidayat, S., & Sari, M. (2019). Pengaruh tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 85–97.
17. Kuncoro, M. (2018). Analisis kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 1–15.
18. Putri, R. A., & Setiawan, A. (2020). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 45–58.